MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 130/Permentan/SR.130/11/2014

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;

b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk;

c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan agar dalam pelaksanaan subsidi pupuk dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) juncto Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5593);
15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
19. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 125);
20. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
21. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kementerian Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
27. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 662);

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);

31. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;

32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Memperhatikan: Kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian tanggal 26 September 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

2. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

3. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompoktani dan/atau petani di sektor pertanian.

4. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.

5. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di provinsi.

6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.

8. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.

9. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.

10. Kelompoktani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.

11. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.

12. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

13. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

14. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompoktani atau penyalur sarana produksi pertanian.

15. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk kabupaten/kota.

16. Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.

17. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian tanaman pangan di provinsi atau kabupaten/kota.

BAB II
JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

(1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

(2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP36, ZA dan NPK.

BAB III
PERUNTUKKAN DAN KEBUTUHAN
PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

(1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.

(2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

(1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran Pemupukan Berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas Provinsi kepada Direktur Jenderal.

(2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor, provinsi, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

(1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

(2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada pertengahan bulan Desember 2014.

Pasal 6

(1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota.

(2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten/Kota setempat.

(3) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada akhir bulan Desember 2014.

Pasal 7

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

Pasal 8

Dinas Kabupaten/Kota bersama kelembagaan penyuluhan tingkat Kabupaten/Kota wajib melaksanakan pembinaan kepada Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan Pupuk Besubsidi di tingkat Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani di wilayahnya.

BAB IV
REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

(1) Dalam hal Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Realokasi antar provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
   b. Realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi.
   c. Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

(2) Provinsi yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur atau realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b.

(3) Kabupaten/Kota yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b atau realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota atau realokasi antar kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c.

(4) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu kabupaten/kota dan kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui realokasi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (3) dan (4).

BAB V
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 10

(1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

(2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani diatur sebagai berikut:

a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani.

b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani dan alokasi di masing-masing wilayah.

(3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kelembagaan penyuluhan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6.

(4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan Pemupukan Berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.

(5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di kabupaten/kota.

(6) Dinas yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal.

(7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas.

(8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

(1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur di Lini III dan Penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Untuk menjamin ketersediaan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 12

(1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

(2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- Pupuk Urea = Rp. 1.800; per kg;
- Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg;
- Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg;
- Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg;
- Pupuk Organik = Rp. 500; per kg;

(3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- Pupuk Urea = 50 kg;
- Pupuk SP-36 = 50 kg;
- Pupuk ZA = 50 kg;
- Pupuk NPK = 50 kg;
- Pupuk Organik = 40 kg;

Pasal 13

(1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan

(2) Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

(1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani.

(2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal.

Pasal 16

(1) KPPP provinsi dan kabupaten/kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.

(2) KPPP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 17

(1) KPPP kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.

(2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.

(3) KPPP provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.

(4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan mengenai pelaksanaan teknis Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Nopember 2014

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
9. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
10. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
11. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
12. Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero).

Lampiran I. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014
Tanggal : 27 Nopember 2014

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2015
MENURUT SUB SEKTOR

SUB SEKTOR	JENIS PUPUK (Ton)				
	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
Tanaman Pangan	3.071.382	567.317	713.097	1.857.441	721.512
Hortikultura	181.378	45.961	61.191	165.344	53.991
Perkebunan	677.705	197.985	264.473	509.338	134.097
Peternakan	76.789	12.888	11.239	17.877	90.401
Perikanan Budidaya	92.746	25.849	-	-	-
JUMLAH	4.100.000	850.000	1.050.000	2.550.000	1.000.000

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Nopember 2014

MENTERI PERTANIAN,

AMRAN SULAIMAN

Lampiran II. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014
Tanggal : 27 Nopember 2014

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2015
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI

NO.	PROPINSI	JENIS PUPUK (Ton)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	ACEH	71.000	21.000	11.000	50.000	21.400
2	SUMATERA UTARA	164.000	48.050	52.000	135.000	35.000
3	SUMATERA BARAT	70.000	25.500	21.000	61.000	23.000
4	J A M B I	26.000	18.800	8.100	50.000	8.180
5	R I A U	37.000	14.000	12.000	53.000	10.000
6	BENGKULU	22.000	8.000	6.100	32.500	7.000
7	SUMATERA SELATAN	161.700	40.000	9.000	114.550	21.200
8	BANGKA BELITUNG	18.000	4.000	2.500	19.000	6.000
9	LAMPUNG	250.000	46.000	21.100	141.000	26.000
10	KEP. RIAU	100	50	50	200	100
11	DKI. JAKARTA	300	90	40	150	100
12	BANTEN	62.000	22.000	2.100	28.000	8.000
13	JAWA BARAT	583.200	150.000	71.000	331.600	59.000
14	D.I. YOGYAKARTA	40.000	4.350	9.320	25.000	14.500
15	JAWA TENGAH	830.000	164.000	232.300	427.000	258.000
16	JAWA TIMUR	1.052.460	163.000	471.200	599.000	370.000
17	B A L I	45.000	2.500	8.500	23.300	25.000
18	KALIMANTAN BARAT	35.500	14.000	5.500	74.900	23.000
19	KALIMANTAN TENGAH	18.000	5.000	2.200	27.300	4.000
20	KALIMANTAN SELATAN	40.870	7.500	2.500	43.000	7.500
21	KALIMANTAN TIMUR	21.000	5.500	3.500	28.200	2.000
22	KALIMANTAN UTARA	2.000	330	390	2.000	500
23	SULAWESI UTARA	19.000	4.700	600	13.000	1.900
24	GORONTALO	18.000	1.500	900	18.300	1.500
25	SULAWESI TENGAH	30.000	4.000	11.000	29.700	3.800
26	SULAWESI TENGGARA	26.800	7.830	4.700	17.000	6.500
27	SULAWESI SELATAN	248.400	40.000	52.400	118.000	34.000
28	SULAWESI BARAT	27.000	2.500	7.100	16.700	1.500
29	NUSA TENGGARA BARAT	145.000	17.000	17.000	45.000	11.500
30	NUSA TENGGARA TIMUR	24.000	5.000	2.960	11.000	5.000
31	MALUKU	3.500	500	480	4.000	1.000
32	PAPUA	6.300	2.700	700	8.000	2.500
33	MALUKU UTARA	670	200	500	2.000	1.000
34	PAPUA BARAT	1.200	400	260	1.600	320
JUMLAH		4.100.000	850.000	1.050.000	2.550.000	1.000.000

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Nopember 2014

MENTERI PERTANIAN,

AMRAN SULAIMAN

Lampiran III. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014
Tanggal : 27 Nopember 2014

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2015 MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

(Ton)

JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
UREA	4.100.000	384.535	303.577	358.967	376.052	382.864	310.089	251.724	204.949	262.127	311.922	423.219	529.974
SP-36	850.000	84.051	84.654	86.924	87.711	78.668	55.943	39.511	29.598	50.448	68.663	90.212	93.616
ZA	1.050.000	105.965	106.826	101.936	96.477	94.071	86.049	69.812	51.009	68.815	93.038	109.332	66.670
NPK	2.550.000	228.746	263.758	265.759	278.406	230.511	201.419	142.089	99.398	141.403	195.822	242.374	260.316
ORGANIK	1.000.000	64.299	79.629	99.586	102.313	94.321	62.986	78.519	56.069	62.888	85.019	107.814	106.558
JUMLAH PUPUK	9.550.000	867.595	838.445	913.173	940.960	880.434	716.485	581.654	441.023	585.681	754.464	972.952	1.057.135

Jenis Pupuk : UREA

(Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	3.071.382	288.062	227.415	268.908	281.707	286.810	232.293	188.571	153.531	196.364	233.666	317.041	397.013
Hortikultura	181.378	17.011	13.430	15.880	16.636	16.937	13.718	11.136	9.067	11.596	13.799	18.723	23.445
Perkebunan	677.705	63.561	50.179	59.335	62.159	63.285	51.256	41.608	33.877	43.328	51.559	69.956	87.601
Peternakan	76.789	7.202	5.686	6.723	7.043	7.171	5.808	4.715	3.839	4.909	5.842	7.926	9.926
Perikanan Budidaya	92.746	8.699	6.867	8.120	8.507	8.661	7.015	5.694	4.636	5.930	7.056	9.574	11.989
JUMLAH	4.100.000	384.535	303.577	358.967	376.052	382.864	310.089	251.724	204.949	262.127	311.922	423.219	529.974

Jenis Pupuk : SP-36

(Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	567.317	56.098	56.501	58.016	58.541	52.505	37.338	26.371	19.755	33.671	45.828	60.211	62.483
Hortikultura	45.961	4.545	4.577	4.700	4.743	4.254	3.025	2.136	1.600	2.728	3.713	4.878	5.062
Perkebunan	197.985	19.577	19.718	20.247	20.430	18.324	13.030	9.203	6.894	11.751	15.993	21.013	21.805
Peternakan	12.888	1.274	1.284	1.318	1.330	1.193	848	599	449	765	1.041	1.368	1.419
Perikanan Budidaya	25.849	2.556	2.574	2.643	2.667	2.392	1.701	1.202	900	1.534	2.088	2.743	2.847
JUMLAH	850.000	84.051	84.654	86.924	87.711	78.668	55.943	39.511	29.598	50.448	68.663	90.212	93.616

Lampiran 3.1. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014
Tanggal : 27 Nopember 2014

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	71.000	6.659	5.257	6.216	6.512	6.630	5.370	4.359	3.549	4.539	5.402	7.329	9.178
2	SUMATERA UTARA	164.000	15.381	12.143	14.359	15.042	15.315	12.404	10.069	8.198	10.485	12.477	16.929	21.199
3	SUMATERA BARAT	70.000	6.565	5.183	6.129	6.420	6.537	5.294	4.298	3.499	4.475	5.326	7.226	9.048
4	J A M B I	26.000	2.439	1.925	2.276	2.385	2.428	1.966	1.596	1.300	1.662	1.978	2.684	3.361
5	R I A U	37.000	3.470	2.740	3.239	3.394	3.455	2.798	2.272	1.850	2.366	2.815	3.819	4.783
6	BENGKULU	22.000	2.063	1.629	1.926	2.018	2.054	1.664	1.351	1.100	1.407	1.674	2.271	2.844
7	SUMATERA SELATAN	161.700	15.166	11.973	14.157	14.831	15.100	12.230	9.928	8.083	10.338	12.302	16.691	20.902
8	BANGKA BELITUNG	18.000	1.688	1.333	1.576	1.651	1.681	1.361	1.105	900	1.151	1.369	1.858	2.327
9	LAMPUNG	250.000	23.447	18.511	21.888	22.930	23.345	18.908	15.349	12.497	15.983	19.020	25.806	32.315
10	KEP. RIAU	100	9	7	9	9	9	8	6	5	6	8	10	13
11	DKI. JAKARTA	300	28	22	26	28	28	23	18	15	19	23	31	39
12	BANTEN	62.000	5.815	4.591	5.428	5.687	5.790	4.689	3.807	3.099	3.964	4.717	6.400	8.014
13	JAWA BARAT	583.200	54.698	43.182	51.061	53.491	54.460	44.108	35.806	29.153	37.286	44.369	60.200	75.386
14	D.I. YOGYAKARTA	40.000	3.752	2.962	3.502	3.669	3.735	3.025	2.456	2.000	2.557	3.043	4.129	5.170
15	JAWA TENGAH	830.000	77.845	61.456	72.669	76.128	77.507	62.774	50.959	41.490	53.065	63.145	85.676	107.287
16	JAWA TIMUR	1.052.460	98.709	77.927	92.146	96.532	98.280	79.599	64.617	52.610	67.287	80.070	108.639	136.043
17	B A L I	45.000	4.221	3.332	3.940	4.127	4.202	3.403	2.763	2.249	2.877	3.424	4.645	5.817
18	KALIMANTAN BARAT	35.500	3.330	2.629	3.108	3.256	3.315	2.685	2.180	1.775	2.270	2.701	3.664	4.589
19	KALIMANTAN TENGAH	18.000	1.688	1.333	1.576	1.651	1.681	1.361	1.105	900	1.151	1.369	1.858	2.327
20	KALIMANTAN SELATAN	40.870	3.833	3.026	3.578	3.749	3.816	3.091	2.509	2.043	2.613	3.109	4.219	5.283
21	KALIMANTAN TIMUR	21.000	1.970	1.555	1.839	1.926	1.961	1.588	1.289	1.050	1.343	1.598	2.168	2.715
22	KALIMANTAN UTARA	2.000	188	148	175	183	187	151	123	100	128	152	206	259
23	SULAWESI UTARA	19.000	1.782	1.407	1.664	1.743	1.774	1.437	1.167	950	1.215	1.445	1.961	2.456
24	GORONTALO	18.000	1.688	1.333	1.576	1.651	1.681	1.361	1.105	900	1.151	1.369	1.858	2.327
25	SULAWESI TENGAH	30.000	2.814	2.221	2.627	2.752	2.801	2.269	1.842	1.500	1.918	2.282	3.097	3.878
26	SULAWESI TENGGARA	26.800	2.514	1.984	2.346	2.458	2.503	2.027	1.645	1.340	1.713	2.039	2.766	3.464
27	SULAWESI SELATAN	248.400	23.297	18.392	21.748	22.783	23.196	18.787	15.251	12.417	15.881	18.898	25.641	32.109
28	SULAWESI BARAT	27.000	2.532	1.999	2.364	2.476	2.521	2.042	1.658	1.350	1.726	2.054	2.787	3.490
29	NUSA TENGGARA BARAT	145.000	13.599	10.736	12.695	13.299	13.540	10.967	8.902	7.248	9.270	11.031	14.968	18.743
30	NUSA TENGGARA TIMUR	24.000	2.251	1.777	2.101	2.201	2.241	1.815	1.474	1.200	1.534	1.826	2.477	3.102
31	MALUKU	3.500	328	259	306	321	327	265	215	175	224	266	361	452
32	PAPUA	6.300	591	466	552	578	588	476	387	315	403	479	650	814
33	MALUKU UTARA	670	63	50	59	61	63	51	41	33	43	51	69	87
34	PAPUA BARAT	1.200	113	89	105	110	112	91	74	60	77	91	124	155
JUMLAH PROPINSI		4.100.000	384.535	303.577	358.967	376.052	382.864	310.089	251.724	204.949	262.127	311.922	423.219	529.974

Lampiran 3.2. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014
Tanggal : 27 Nopember 2014

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

Sub Sektor : Tanaman Pangan

(Ton)

No.	Propinsi	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	53.187	4.988	3.938	4.657	4.878	4.967	4.023	3.265	2.659	3.400	4.046	5.490	6.875
2	SUMATERA UTARA	122.855	11.522	9.097	10.756	11.268	11.472	9.292	7.543	6.141	7.855	9.347	12.682	15.881
3	SUMATERA BARAT	52.438	4.918	3.883	4.591	4.810	4.897	3.966	3.220	2.621	3.353	3.989	5.413	6.778
4	J A M B I	19.477	1.827	1.442	1.705	1.786	1.819	1.473	1.196	974	1.245	1.482	2.011	2.518
5	R I A U	27.717	2.600	2.052	2.427	2.542	2.588	2.096	1.702	1.386	1.772	2.109	2.861	3.583
6	BENGKULU	16.481	1.546	1.220	1.443	1.512	1.539	1.246	1.012	824	1.054	1.254	1.701	2.130
7	SUMATERA SELATAN	121.132	11.361	8.969	10.605	11.110	11.312	9.161	7.437	6.055	7.744	9.216	12.504	15.658
8	BANGKA BELITUNG	13.484	1.265	998	1.181	1.237	1.259	1.020	828	674	862	1.026	1.392	1.743
9	LAMPUNG	187.279	17.565	13.867	16.397	17.177	17.488	14.164	11.498	9.362	11.973	14.248	19.332	24.208
10	KEP. RIAU	75	7	6	7	7	7	6	5	4	5	6	8	10
11	DKI. JAKARTA	225	21	17	20	21	21	17	14	11	14	17	23	29
12	BANTEN	46.445	4.356	3.439	4.066	4.260	4.337	3.513	2.852	2.322	2.969	3.533	4.794	6.004
13	JAWA BARAT	436.885	40.975	32.348	38.251	40.071	40.797	33.042	26.823	21.839	27.932	33.238	45.097	56.473
14	D.I. YOGYAKARTA	29.965	2.810	2.219	2.623	2.748	2.798	2.266	1.840	1.498	1.916	2.280	3.093	3.873
15	JAWA TENGAH	621.767	58.315	46.038	54.438	57.029	58.062	47.025	38.174	31.081	39.752	47.303	64.181	80.371
16	JAWA TIMUR	788.416	73.945	58.377	69.028	72.314	73.623	59.629	48.406	39.411	50.406	59.982	81.384	101.912
17	B A L I	33.710	3.162	2.496	2.951	3.092	3.148	2.550	2.070	1.685	2.155	2.565	3.480	4.357
18	KALIMANTAN BARAT	26.594	2.494	1.969	2.328	2.439	2.483	2.011	1.633	1.329	1.700	2.023	2.745	3.438
19	KALIMANTAN TENGAH	13.484	1.265	998	1.181	1.237	1.259	1.020	828	674	862	1.026	1.392	1.743
20	KALIMANTAN SELATAN	30.616	2.871	2.267	2.681	2.808	2.859	2.316	1.880	1.530	1.957	2.329	3.160	3.958
21	KALIMANTAN TIMUR	15.731	1.475	1.165	1.377	1.443	1.469	1.190	966	786	1.006	1.197	1.624	2.033
22	KALIMANTAN UTARA	1.498	141	111	131	137	140	113	92	75	96	114	155	194
23	SULAWESI UTARA	14.233	1.335	1.054	1.246	1.305	1.329	1.076	874	711	910	1.083	1.469	1.840
24	GORONTALO	13.484	1.265	998	1.181	1.237	1.259	1.020	828	674	862	1.026	1.392	1.743
25	SULAWESI TENGAH	22.474	2.108	1.664	1.968	2.061	2.099	1.700	1.380	1.123	1.437	1.710	2.320	2.905
26	SULAWESI TENGGARA	20.076	1.883	1.487	1.758	1.841	1.875	1.518	1.233	1.004	1.284	1.527	2.072	2.595
27	SULAWESI SELATAN	186.081	17.452	13.778	16.292	17.067	17.376	14.074	11.425	9.302	11.897	14.157	19.208	24.053
28	SULAWESI BARAT	20.226	1.897	1.498	1.771	1.855	1.889	1.530	1.242	1.011	1.293	1.539	2.088	2.614
29	NUSA TENGGARA BARAT	108.622	10.188	8.043	9.510	9.963	10.143	8.215	6.669	5.430	6.945	8.264	11.212	14.041
30	NUSA TENGGARA TIMUR	17.979	1.686	1.331	1.574	1.649	1.679	1.360	1.104	899	1.149	1.368	1.856	2.324
31	MALUKU	2.622	246	194	230	240	245	198	161	131	168	199	271	339
32	PAPUA	4.719	443	349	413	433	441	357	290	236	302	359	487	610
33	MALUKU UTARA	502	47	37	44	46	47	38	31	25	32	38	52	65
34	PAPUA BARAT	899	84	67	79	82	84	68	55	45	57	68	93	116
	JUMLAH PROPINSI	3.071.378	288.062	227.415	268.908	281.707	286.810	232.293	188.571	153.531	196.364	233.666	317.041	397.013

Lampiran 3.3. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014
Tanggal : 27 Nopember 2014

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

Sub Sektor : Hortikultura

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	3.141	295	233	275	288	293	238	193	157	201	239	324	406
2	SUMATERA UTARA	7.255	680	537	635	665	677	549	445	363	464	552	749	938
3	SUMATERA BARAT	3.097	290	229	271	284	289	234	190	155	198	236	320	400
4	J A M B I	1.150	108	85	101	105	107	87	71	57	74	88	119	149
5	R I A U	1.637	154	121	143	150	153	124	100	82	105	125	169	212
6	BENGKULU	973	91	72	85	89	91	74	60	49	62	74	100	126
7	SUMATERA SELATAN	7.153	671	530	626	656	668	541	439	358	457	544	738	925
8	BANGKA BELITUNG	796	75	59	70	73	74	60	49	40	51	61	82	103
9	LAMPUNG	11.060	1.037	819	968	1.014	1.033	836	679	553	707	841	1.142	1.430
10	KEP. RIAU	4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,5	0,6
11	DKI. JAKARTA	13	1,2	1	1,2	1,2	1,2	1	0,8	0,7	0,8	1	1,4	1,7
12	BANTEN	2.743	257	203	240	252	256	207	168	137	175	209	283	355
13	JAWA BARAT	25.800	2.420	1.910	2.259	2.366	2.409	1.951	1.584	1.290	1.649	1.963	2.663	3.335
14	D.I. YOGYAKARTA	1.770	166	131	155	162	165	134	109	88	113	135	183	229
15	JAWA TENGAH	36.718	3.444	2.719	3.215	3.368	3.429	2.777	2.254	1.835	2.348	2.793	3.790	4.746
16	JAWA TIMUR	46.559	4.367	3.447	4.076	4.270	4.348	3.521	2.859	2.327	2.977	3.542	4.806	6.018
17	B A L I	1.991	187	147	174	183	186	151	122	100	127	151	205	257
18	KALIMANTAN BARAT	1.570	147	116	137	144	147	119	96	79	100	119	162	203
19	KALIMANTAN TENGAH	796	75	59	70	73	74	60	49	40	51	61	82	103
20	KALIMANTAN SELATAN	1.808	170	134	158	166	169	137	111	90	116	138	187	234
21	KALIMANTAN TIMUR	929	87	69	81	85	87	70	57	46	59	71	96	120
22	KALIMANTAN UTARA	88	8	7	8	8	8	7	5	4	6	7	9	11
23	SULAWESI UTARA	841	79	62	74	77	78	64	52	42	54	64	87	109
24	GORONTALO	796	75	59	70	73	74	60	49	40	51	61	82	103
25	SULAWESI TENGAH	1.327	124	98	116	122	124	100	81	66	85	101	137	172
26	SULAWESI TENGGARA	1.186	111	88	104	109	111	90	73	59	76	90	122	153
27	SULAWESI SELATAN	10.989	1.031	814	962	1.008	1.026	831	675	549	703	836	1.134	1.420
28	SULAWESI BARAT	1.194	112	88	105	110	112	90	73	60	76	91	123	154
29	NUSA TENGGARA BARAT	6.415	602	475	562	588	599	485	394	321	410	488	662	829
30	NUSA TENGGARA TIMUR	1.062	100	79	93	97	99	80	65	53	68	81	110	137
31	MALUKU	155	15	11	14	14	14	12	10	8	10	12	16	20
32	PAPUA	279	26	21	24	26	26	21	17	14	18	21	29	36
33	MALUKU UTARA	30	3	2	3	3	3	2	2	1	2	2	3	4
34	PAPUA BARAT	53	5	4	5	5	5	4	3	3	3	4	5	7
	JUMLAH PROPINSI	181.378	17.011	13.430	15.880	16.636	16.937	13.718	11.136	9.067	11.596	13.799	18.723	23.445

Lampiran 3.4. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014
Tanggal : 27 Nopember 2014

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

Sub Sektor : Perkebunan

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	11.736	1.101	869	1.028	1.076	1.096	888	721	587	750	893	1.211	1.517
2	SUMATERA UTARA	27.108	2.542	2.007	2.373	2.486	2.531	2.050	1.664	1.355	1.733	2.062	2.798	3.504
3	SUMATERA BARAT	11.571	1.085	857	1.013	1.061	1.080	875	710	578	740	880	1.194	1.496
4	J A M B I	4.298	403	318	376	394	401	325	264	215	275	327	444	556
5	R I A U	6.116	574	453	535	561	571	463	375	306	391	465	631	791
6	BENGKULU	3.636	341	269	318	334	340	275	223	182	232	277	375	470
7	SUMATERA SELATAN	26.728	2.507	1.979	2.340	2.451	2.496	2.021	1.641	1.336	1.709	2.033	2.759	3.455
8	BANGKA BELITUNG	2.975	279	220	260	273	278	225	183	149	190	226	307	385
9	LAMPUNG	41.323	3.876	3.060	3.618	3.790	3.859	3.125	2.537	2.066	2.642	3.144	4.266	5.342
10	KEP. RIAU	17	1,6	1,2	1,4	1,5	1,5	1,3	1	0,8	1,1	1,3	1,7	2,1
11	DKI. JAKARTA	50	5	4	4	5	5	4	3	2	3	4	5	6
12	BANTEN	10.248	961	759	897	940	957	775	629	512	655	780	1.058	1.325
13	JAWA BARAT	96.399	9.041	7.138	8.440	8.842	9.002	7.291	5.919	4.819	6.163	7.334	9.951	12.461
14	D.I. YOGYAKARTA	6.612	620	490	579	606	617	500	406	331	423	503	682	855
15	JAWA TENGAH	137.194	12.867	10.158	12.012	12.583	12.811	10.376	8.423	6.858	8.771	10.438	14.162	17.734
16	JAWA TIMUR	173.965	16.316	12.881	15.231	15.956	16.245	13.157	10.681	8.696	11.122	13.235	17.957	22.487
17	B A L I	7.438	698	551	651	682	695	563	457	372	476	566	768	961
18	KALIMANTAN BARAT	5.868	550	434	514	538	548	444	360	293	375	446	606	759
19	KALIMANTAN TENGAH	2.975	279	220	260	273	278	225	183	149	190	226	307	385
20	KALIMANTAN SELATAN	6.756	634	500	591	620	631	511	415	338	432	514	697	873
21	KALIMANTAN TIMUR	3.471	326	257	304	318	324	263	213	174	222	264	358	449
22	KALIMANTAN UTARA	331	31	24	29	30	31	25	20	17	21	25	34	43
23	SULAWESI UTARA	3.141	295	233	275	288	293	238	193	157	201	239	324	406
24	GORONTALO	2.975	279	220	260	273	278	225	183	149	190	226	307	385
25	SULAWESI TENGAH	4.959	465	367	434	455	463	375	304	248	317	377	512	641
26	SULAWESI TENGGARA	4.430	415	328	388	406	414	335	272	221	283	337	457	573
27	SULAWESI SELATAN	41.059	3.851	3.040	3.595	3.766	3.834	3.105	2.521	2.052	2.625	3.124	4.238	5.307
28	SULAWESI BARAT	4.463	419	330	391	409	417	338	274	223	285	340	461	577
29	NUSA TENGGARA BARAT	23.968	2.248	1.775	2.098	2.198	2.238	1.813	1.472	1.198	1.532	1.823	2.474	3.098
30	NUSA TENGGARA TIMUR	3.967	372	294	347	364	370	300	244	198	254	302	409	513
31	MALUKU	579	54	43	51	53	54	44	36	29	37	44	60	75
32	PAPUA	1.041	98	77	91	96	97	79	64	52	67	79	107	135
33	MALUKU UTARA	111	10	8	10	10	10	8	7	6	7	8	11	14
34	PAPUA BARAT	198	19	15	17	18	19	15	12	10	13	15	20	26
	JUMLAH PROPINSI	677.705	63.561	50.179	59.335	62.159	63.285	51.256	41.608	33.877	43.328	51.559	69.956	87.601

Lampiran 3.5. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014
Tanggal : 27 Nopember 2014

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

Sub Sektor : Peternakan

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	1.330	125	98	116	122	124	101	82	66	85	101	137	172
2	SUMATERA UTARA	3.072	288	227	269	282	287	232	189	154	196	234	317	397
3	SUMATERA BARAT	1.311	123	97	115	120	122	99	80	66	84	100	135	169
4	J A M B I	487	46	36	43	45	45	37	30	24	31	37	50	63
5	R I A U	693	65	51	61	64	65	52	43	35	44	53	72	90
6	BENGKULU	412	39	31	36	38	38	31	25	21	26	31	43	53
7	SUMATERA SELATAN	3.028	284	224	265	278	283	229	186	151	194	230	313	391
8	BANGKA BELITUNG	337	32	25	30	31	31	25	21	17	22	26	35	44
9	LAMPUNG	4.682	439	347	410	429	437	354	287	234	299	356	483	605
10	KEP. RIAU	2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
11	DKI. JAKARTA	6	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,6	0,7
12	BANTEN	1.161	109	86	102	107	108	88	71	58	74	88	120	150
13	JAWA BARAT	10.923	1.024	809	956	1.002	1.020	826	671	546	698	831	1.127	1.412
14	D.I. YOGYAKARTA	749	70	55	66	69	70	57	46	37	48	57	77	97
15	JAWA TENGAH	15.545	1.458	1.151	1.361	1.426	1.452	1.176	954	777	994	1.183	1.605	2.009
16	JAWA TIMUR	19.712	1.849	1.460	1.726	1.808	1.841	1.491	1.210	985	1.260	1.500	2.035	2.548
17	B A L I	843	79	62	74	77	79	64	52	42	54	64	87	109
18	KALIMANTAN BARAT	665	62	49	58	61	62	50	41	33	43	51	69	86
19	KALIMANTAN TENGAH	337	32	25	30	31	31	25	21	17	22	26	35	44
20	KALIMANTAN SELATAN	765	72	57	67	70	71	58	47	38	49	58	79	99
21	KALIMANTAN TIMUR	393	37	29	34	36	37	30	24	20	25	30	41	51
22	KALIMANTAN UTARA	37	4	3	3	3	3	3	2	2	2	3	4	5
23	SULAWESI UTARA	356	33	26	31	33	33	27	22	18	23	27	37	46
24	GORONTALO	337	32	25	30	31	31	25	21	17	22	26	35	44
25	SULAWESI TENGAH	562	53	42	49	52	52	42	34	28	36	43	58	73
26	SULAWESI TENGGARA	502	47	37	44	46	47	38	31	25	32	38	52	65
27	SULAWESI SELATAN	4.652	436	344	407	427	434	352	286	233	297	354	480	601
28	SULAWESI BARAT	506	47	37	44	46	47	38	31	25	32	38	52	65
29	NUSA TENGGARA BARAT	2.716	255	201	238	249	254	205	167	136	174	207	280	351
30	NUSA TENGGARA TIMUR	449	42	33	39	41	42	34	28	22	29	34	46	58
31	MALUKU	66	6	5	6	6	6	5	4	3	4	5	7	8
32	PAPUA	118	11	9	10	11	11	9	7	6	8	9	12	15
33	MALUKU UTARA	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
34	PAPUA BARAT	22	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	3
	JUMLAH PROPINSI	76.789	7.202	5.686	6.723	7.043	7.171	5.808	4.715	3.839	4.909	5.842	7.926	9.926

Lampiran 3.6. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014
Tanggal : 27 Nopember 2014

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

Sub Sektor : Perikanan Budidaya

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	1.606	151	119	141	147	150	121	99	80	103	122	166	208
2	SUMATERA UTARA	3.710	348	275	325	340	346	281	228	185	237	282	383	480
3	SUMATERA BARAT	1.583	149	117	139	145	148	120	97	79	101	120	163	205
4	J A M B I	588	55	44	51	54	55	44	36	29	38	45	61	76
5	R I A U	837	78	62	73	77	78	63	51	42	54	64	86	108
6	BENGKULU	498	47	37	44	46	46	38	31	25	32	38	51	64
7	SUMATERA SELATAN	3.658	343	271	320	335	342	277	225	183	234	278	378	473
8	BANGKA BELITUNG	407	38	30	36	37	38	31	25	20	26	31	42	53
9	LAMPUNG	5.655	530	419	495	519	528	428	347	283	362	430	584	731
10	KEP. RIAU	2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3
11	DKI. JAKARTA	7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4	0,3	0,4	0,5	0,7	0,9
12	BANTEN	1.403	132	104	123	129	131	106	86	70	90	107	145	181
13	JAWA BARAT	13.193	1.237	977	1.155	1.210	1.232	998	810	659	843	1.004	1.362	1.705
14	D.I. YOGYAKARTA	905	85	67	79	83	84	68	56	45	58	69	93	117
15	JAWA TENGAH	18.775	1.761	1.390	1.644	1.722	1.753	1.420	1.153	939	1.200	1.428	1.938	2.427
16	JAWA TIMUR	23.808	2.233	1.763	2.084	2.184	2.223	1.801	1.462	1.190	1.522	1.811	2.458	3.077
17	B A L I	1.018	95	75	89	93	95	77	62	51	65	77	105	132
18	KALIMANTAN BARAT	803	75	59	70	74	75	61	49	40	51	61	83	104
19	KALIMANTAN TENGAH	407	38	30	36	37	38	31	25	20	26	31	42	53
20	KALIMANTAN SELATAN	925	87	68	81	85	86	70	57	46	59	70	95	120
21	KALIMANTAN TIMUR	475	45	35	42	44	44	36	29	24	30	36	49	61
22	KALIMANTAN UTARA	45	4	3	4	4	4	3	3	2	3	3	5	6
23	SULAWESI UTARA	430	40	32	38	39	40	33	26	21	27	33	44	56
24	GORONTALO	407	38	30	36	37	38	31	25	20	26	31	42	53
25	SULAWESI TENGAH	679	64	50	59	62	63	51	42	34	43	52	70	88
26	SULAWESI TENGGARA	606	57	45	53	56	57	46	37	30	39	46	63	78
27	SULAWESI SELATAN	5.619	527	416	492	515	525	425	345	281	359	427	580	726
28	SULAWESI BARAT	611	57	45	53	56	57	46	37	31	39	46	63	79
29	NUSA TENGGARA BARAT	3.280	308	243	287	301	306	248	201	164	210	250	339	424
30	NUSA TENGGARA TIMUR	543	51	40	48	50	51	41	33	27	35	41	56	70
31	MALUKU	79	7	6	7	7	7	6	5	4	5	6	8	10
32	PAPUA	143	13	11	12	13	13	11	9	7	9	11	15	18
33	MALUKU UTARA	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
34	PAPUA BARAT	27	3	2	2	2	3	2	2	1	2	2	3	4
JUMLAH PROPINSI		92.746	8.699	6.867	8.120	8.507	8.661	7.015	5.694	4.636	5.930	7.056	9.574	11.989

Lampiran 3.7. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014
Tanggal : 27 Nopember 2014

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	21.000	2.077	2.091	2.148	2.167	1.944	1.382	976	731	1.246	1.696	2.229	2.313
2	SUMATERA UTARA	48.050	4.751	4.785	4.914	4.958	4.447	3.162	2.234	1.673	2.852	3.881	5.100	5.292
3	SUMATERA BARAT	25.500	2.522	2.540	2.608	2.631	2.360	1.678	1.185	888	1.513	2.060	2.706	2.808
4	J A M B I	18.800	1.859	1.872	1.923	1.940	1.740	1.237	874	655	1.116	1.519	1.995	2.071
5	R I A U	14.000	1.384	1.394	1.432	1.445	1.296	921	651	487	831	1.131	1.486	1.542
6	BENGKULU	8.000	791	797	818	826	740	527	372	279	475	646	849	881
7	SUMATERA SELATAN	40.000	3.955	3.984	4.091	4.128	3.702	2.633	1.859	1.393	2.374	3.231	4.245	4.405
8	BANGKA BELITUNG	4.000	396	398	409	413	370	263	186	139	237	323	425	441
9	LAMPUNG	46.000	4.549	4.581	4.704	4.747	4.257	3.028	2.138	1.602	2.730	3.716	4.882	5.066
10	KEP. RIAU	50	5	5	5	5	5	3	2	2	3	4	5	6
11	DKI. JAKARTA	90	9	9	9	9	8	6	4	3	5	7	10	10
12	BANTEN	22.000	2.175	2.191	2.250	2.270	2.036	1.448	1.023	766	1.306	1.777	2.335	2.423
13	JAWA BARAT	150.000	14.833	14.939	15.340	15.478	13.883	9.872	6.973	5.223	8.903	12.117	15.920	16.521
14	D.I. YOGYAKARTA	4.350	430	433	445	449	403	286	202	151	258	351	462	479
15	JAWA TENGAH	164.000	16.217	16.333	16.771	16.923	15.178	10.794	7.623	5.711	9.734	13.248	17.406	18.062
16	JAWA TIMUR	163.000	16.118	16.234	16.669	16.820	15.086	10.728	7.577	5.676	9.674	13.167	17.300	17.952
17	B A L I	2.500	247	249	256	258	231	165	116	87	148	202	265	275
18	KALIMANTAN BARAT	14.000	1.384	1.394	1.432	1.445	1.296	921	651	487	831	1.131	1.486	1.542
19	KALIMANTAN TENGAH	5.000	494	498	511	516	463	329	232	174	297	404	531	551
20	KALIMANTAN SELATAN	7.500	742	747	767	774	694	494	349	261	445	606	796	826
21	KALIMANTAN TIMUR	5.500	544	548	562	568	509	362	256	192	326	444	584	606
22	KALIMANTAN UTARA	330	33	33	34	34	31	22	15	11	20	27	35	36
23	SULAWESI UTARA	4.700	465	468	481	485	435	309	218	164	279	380	499	518
24	GORONTALO	1.500	148	149	153	155	139	99	70	52	89	121	159	165
25	SULAWESI TENGAH	4.000	396	398	409	413	370	263	186	139	237	323	425	441
26	SULAWESI TENGGARA	7.830	774	780	801	808	725	515	364	273	465	633	831	862
27	SULAWESI SELATAN	40.000	3.955	3.984	4.091	4.128	3.702	2.633	1.859	1.393	2.374	3.231	4.245	4.405
28	SULAWESI BARAT	2.500	247	249	256	258	231	165	116	87	148	202	265	275
29	NUSA TENGGARA BARAT	17.000	1.681	1.693	1.738	1.754	1.573	1.119	790	592	1.009	1.373	1.804	1.872
30	NUSA TENGGARA TIMUR	5.000	494	498	511	516	463	329	232	174	297	404	531	551
31	MALUKU	500	49	50	51	52	46	33	23	17	30	40	53	55
32	PAPUA	2.700	267	269	276	279	250	178	126	94	160	218	287	297
33	MALUKU UTARA	200	20	20	20	21	19	13	9	7	12	16	21	22
34	PAPUA BARAT	400	40	40	41	41	37	26	19	14	24	32	42	44
	JUMLAH PROPINSI	850.000	84.051	84.654	86.924	87.711	78.668	55.943	39.511	29.598	50.448	68.663	90.212	93.616

Lampiran 3.8. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014
Tanggal : 27 Nopember 2014

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

Sub Sektor : Tanaman Pangan

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	14.016	1.386	1.396	1.433	1.446	1.297	922	652	488	832	1.132	1.488	1.544
2	SUMATERA UTARA	32.070	3.171	3.194	3.280	3.309	2.968	2.111	1.491	1.117	1.903	2.591	3.404	3.532
3	SUMATERA BARAT	17.020	1.683	1.695	1.740	1.756	1.575	1.120	791	593	1.010	1.375	1.806	1.874
4	J A M B I	12.548	1.241	1.250	1.283	1.295	1.161	826	583	437	745	1.014	1.332	1.382
5	R I A U	9.344	924	931	956	964	865	615	434	325	555	755	992	1.029
6	BENGKULU	5.339	528	532	546	551	494	351	248	186	317	431	567	588
7	SUMATERA SELATAN	26.697	2.640	2.659	2.730	2.755	2.471	1.757	1.241	930	1.585	2.157	2.833	2.940
8	BANGKA BELITUNG	2.670	264	266	273	275	247	176	124	93	158	216	283	294
9	LAMPUNG	30.702	3.036	3.058	3.140	3.168	2.841	2.021	1.427	1.069	1.822	2.480	3.258	3.381
10	KEP. RIAU	33	3	3	3	3	3	2	2	1	2	3	4	4
11	DKI. JAKARTA	60	6	6	6	6	6	4	3	2	4	5	6	7
12	BANTEN	14.683	1.452	1.462	1.502	1.515	1.359	966	683	511	871	1.186	1.558	1.617
13	JAWA BARAT	100.115	9.900	9.971	10.238	10.331	9.266	6.589	4.654	3.486	5.942	8.087	10.625	11.026
14	D.I. YOGYAKARTA	2.903	287	289	297	300	269	191	135	101	172	235	308	320
15	JAWA TENGAH	109.459	10.824	10.901	11.194	11.295	10.130	7.204	5.088	3.812	6.496	8.842	11.617	12.055
16	JAWA TIMUR	108.791	10.758	10.835	11.125	11.226	10.069	7.160	5.057	3.788	6.457	8.788	11.546	11.982
17	B A L I	1.669	165	166	171	172	154	110	78	58	99	135	177	184
18	KALIMANTAN BARAT	9.344	924	931	956	964	865	615	434	325	555	755	992	1.029
19	KALIMANTAN TENGAH	3.337	330	332	341	344	309	220	155	116	198	270	354	368
20	KALIMANTAN SELATAN	5.006	495	499	512	517	463	329	233	174	297	404	531	551
21	KALIMANTAN TIMUR	3.671	363	366	375	379	340	242	171	128	218	297	390	404
22	KALIMANTAN UTARA	220	22	22	23	23	20	14	10	8	13	18	23	24
23	SULAWESI UTARA	3.137	310	312	321	324	290	206	146	109	186	253	333	345
24	GORONTALO	1.001	99	100	102	103	93	66	47	35	59	81	106	110
25	SULAWESI TENGAH	2.670	264	266	273	275	247	176	124	93	158	216	283	294
26	SULAWESI TENGGARA	5.226	517	520	534	539	484	344	243	182	310	422	555	576
27	SULAWESI SELATAN	26.697	2.640	2.659	2.730	2.755	2.471	1.757	1.241	930	1.585	2.157	2.833	2.940
28	SULAWESI BARAT	1.669	165	166	171	172	154	110	78	58	99	135	177	184
29	NUSA TENGGARA BARAT	11.346	1.122.	1.130	1.160	1.171	1.050	747	527	395	673	917	1.204	1.250
30	NUSA TENGGARA TIMUR	3.337	330	332	341	344	309	220	155	116	198	270	354	368
31	MALUKU	334	33	33	34	34	31	22	16	12	20	27	35	37
32	PAPUA	1.802	178	179	184	186	167	119	84	63	107	146	191	198
33	MALUKU UTARA	133	13	13	14	14	12	9	6	5	8	11	14	15
34	PAPUA BARAT	267	26	27	27	28	25	18	12	9	16	22	28	29
	JUMLAH PROPINSI	567.317	56.098	56.501	58.016	58.541	52.505	37.338	26.371	19.755	33.671	45.828	60.211	62.483

Lampiran 3.9. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014
Tanggal : 27 Nopember 2014

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

Sub Sektor : Hortikultura

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	1.136	112	113	116	117	105	75	53	40	67	92	121	125
2	SUMATERA UTARA	2.598	257	259	266	268	240	171	121	90	154	210	276	286
3	SUMATERA BARAT	1.379	136	137	141	142	128	91	64	48	82	111	146	152
4	J A M B I	1.017	101	101	104	105	94	67	47	35	60	82	108	112
5	R I A U	757	75	75	77	78	70	50	35	26	45	61	80	83
6	BENGKULU	433	43	43	44	45	40	28	20	15	26	35	46	48
7	SUMATERA SELATAN	2.163	214	215	221	223	200	142	101	75	128	175	230	238
8	BANGKA BELITUNG	216	21	22	22	22	20	14	10	8	13	17	23	24
9	LAMPUNG	2.487	246	248	254	257	230	164	116	87	148	201	264	274
10	KEP. RIAU	3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3
11	DKI. JAKARTA	5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5
12	BANTEN	1.190	118	118	122	123	110	78	55	41	71	96	126	131
13	JAWA BARAT	8.111	802	808	829	837	751	534	377	282	481	655	861	893
14	D.I. YOGYAKARTA	235	23	23	24	24	22	15	11	8	14	19	25	26
15	JAWA TENGAH	8.868	877	883	907	915	821	584	412	309	526	716	941	977
16	JAWA TIMUR	8.814	872	878	901	909	816	580	410	307	523	712	935	971
17	B A L I	135	13	13	14	14	13	9	6	5	8	11	14	15
18	KALIMANTAN BARAT	757	75	75	77	78	70	50	35	26	45	61	80	83
19	KALIMANTAN TENGAH	270	27	27	28	28	25	18	13	9	16	22	29	30
20	KALIMANTAN SELATAN	406	40	40	41	42	38	27	19	14	24	33	43	45
21	KALIMANTAN TIMUR	297	29	30	30	31	28	20	14	10	18	24	32	33
22	KALIMANTAN UTARA	18	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2
23	SULAWESI UTARA	254	25	25	26	26	24	17	12	9	15	21	27	28
24	GORONTALO	81	8	8	8	8	8	5	4	3	5	7	9	9
25	SULAWESI TENGAH	216	21	22	22	22	20	14	10	8	13	17	23	24
26	SULAWESI TENGGARA	423	42	42	43	44	39	28	20	15	25	34	45	47
27	SULAWESI SELATAN	2.163	214	215	221	223	200	142	101	75	128	175	230	238
28	SULAWESI BARAT	135	13	13	14	14	13	9	6	5	8	11	14	15
29	NUSA TENGGARA BARAT	919	91	92	94	95	85	60	43	32	55	74	98	101
30	NUSA TENGGARA TIMUR	270	27	27	28	28	25	18	13	9	16	22	29	30
31	MALUKU	27	3	3	3	3	3	2	1	1	2	2	3	3
32	PAPUA	146	14	15	15	15	14	10	7	5	9	12	15	16
33	MALUKU UTARA	11	1	1	1	1	1	0,7	0,5	0,4	0,6	0,9	1	1
34	PAPUA BARAT	22	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2
	JUMLAH PROPINSI	45.961	4.545	4.577	4.700	4.743	4.254	3.025	2.136	1.600	2.728	3.713	4.878	5.062

Lampiran 3.10. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014
Tanggal : 27 Nopember 2014

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

Sektor : Perkebunan

(Ton)

.O.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	4.891	484	487	500	505	453	322	227	170	290	395	519	539
2	SUMATERA UTARA	11.192	1.107	1.115	1.145	1.155	1.036	737	520	390	664	904	1.188	1.233
3	SUMATERA BARAT	5.940	587	592	607	613	550	391	276	207	353	480	630	654
4	J A M B I	4.379	433	436	448	452	405	288	204	152	260	354	465	482
5	R I A U	3.261	322	325	333	336	302	215	152	114	194	263	346	359
6	BENGKULU	1.863	184	186	191	192	172	123	87	65	111	151	198	205
7	SUMATERA SELATAN	9.317	921	928	953	961	862	613	433	324	553	753	989	1.026
8	BANGKA BELITUNG	932	92	93	95	96	86	61	43	32	55	75	99	103
9	LAMPUNG	10.714	1.059	1.067	1.096	1.106	992	705	498	373	636	866	1.137	1.180
10	KEP. RIAU	12	1	1	1	1	1	1	0,5	0,4	1	1	1	1
11	DKI. JAKARTA	21	2	2	2	2	2	1	1,0	0,7	1	2	2	2
12	BANTEN	5.124	507	510	524	529	474	337	238	178	304	414	544	564
13	JAWA BARAT	34.939	3.455	3.480	3.573	3.605	3.234	2.299	1.624	1.217	2.074	2.822	3.708	3.848
14	D.I. YOGYAKARTA	1.013	100	101	104	105	94	67	47	35	60	82	108	112
15	JAWA TENGAH	38.199	3.777	3.804	3.906	3.942	3.535	2.514	1.776	1.330	2.267	3.086	4.054	4.207
16	JAWA TIMUR	37.967	3.754	3.781	3.883	3.918	3.514	2.499	1.765	1.322	2.253	3.067	4.029	4.182
17	B A L I	582	58	58	60	60	54	38	27	20	35	47	62	64
18	KALIMANTAN BARAT	3.261	322	325	333	336	302	215	152	114	194	263	346	359
19	KALIMANTAN TENGAH	1.165	115	116	119	120	108	77	54	41	69	94	124	128
20	KALIMANTAN SELATAN	1.747	173	174	179	180	162	115	81	61	104	141	185	192
21	KALIMANTAN TIMUR	1.281	127	128	131	132	119	84	60	45	76	103	136	141
22	KALIMANTAN UTARA	77	8	8	8	8	7	5	4	3	5	6	8	8
23	SULAWESI UTARA	1.095	108	109	112	113	101	72	51	38	65	88	116	121
24	GORONTALO	349	35	35	36	36	32	23	16	12	21	28	37	38
25	SULAWESI TENGAH	932	92	93	95	96	86	61	43	32	55	75	99	103
26	SULAWESI TENGGARA	1.824	180	182	187	188	169	120	85	64	108	147	194	201
27	SULAWESI SELATAN	9.317	921	928	953	961	862	613	433	324	553	753	989	1.026
28	SULAWESI BARAT	582	58	58	60	60	54	38	27	20	35	47	62	64
29	NUSA TENGGARA BARAT	3.960	392	394	405	409	366	261	184	138	235	320	420	436
30	NUSA TENGGARA TIMUR	1.165	115	116	119	120	108	77	54	41	69	94	124	128
31	MALUKU	116	12	12	12	12	11	8	5	4	7	9	12	13
32	PAPUA	629	62	63	64	65	58	41	29	22	37	51	67	69
33	MALUKU UTARA	47	5	5	5	5	4	3	2	2	3	4	5	5
34	PAPUA BARAT	93	9	9	10	10	9	6	4	3	6	8	10	10
	JUMLAH PROPINSI	197.985	19.577	19.718	20.247	20.430	18.324	13.030	9.203	6.894	11.751	15.993	21.013	21.805

Lampiran 3.11. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014
Tanggal : 27 Nopember 2014

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

Sub Sektor : Peternakan

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	318	31	32	33	33	29	21	15	11	19	26	34	35
2	SUMATERA UTARA	729	72	73	75	75	67	48	34	25	43	59	77	80
3	SUMATERA BARAT	387	38	39	40	40	36	25	18	13	23	31	41	43
4	J A M B I	285	28	28	29	29	26	19	13	10	17	23	30	31
5	R I A U	212	21	21	22	22	20	14	10	7	13	17	23	23
6	BENGKULU	121	12	12	12	13	11	8	6	4	7	10	13	13
7	SUMATERA SELATAN	606	60	60	62	63	56	40	28	21	36	49	64	67
8	BANGKA BELITUNG	61	6	6	6	6	6	4	3	2	4	5	6	7
9	LAMPUNG	697	69	69	71	72	65	46	32	24	41	56	74	77
10	KEP. RIAU	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,05	0,04	0,03	0,04	0,1	0,1	0,1
11	DKI. JAKARTA	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,05	0,1	0,1	0,1	0,2
12	BANTEN	334	33	33	34	34	31	22	16	12	20	27	35	37
13	JAWA BARAT	2.274	225	227	233	235	210	150	106	79	135	184	241	250
14	D.I. YOGYAKARTA	66	7	7	7	7	6	4	3	2	4	5	7	7
15	JAWA TENGAH	2.487	246	248	254	257	230	164	116	87	148	201	264	274
16	JAWA TIMUR	2.471	244	246	253	255	229	163	115	86	147	200	262	272
17	B A L I	38	4	4	4	4	4	2	2	1	2	3	4	4
18	KALIMANTAN BARAT	212	21	21	22	22	20	14	10	7	13	17	23	23
19	KALIMANTAN TENGAH	76	7	8	8	8	7	5	4	3	4	6	8	8
20	KALIMANTAN SELATAN	114	11	11	12	12	11	7	5	4	7	9	12	13
21	KALIMANTAN TIMUR	83	8	8	9	9	8	5	4	3	5	7	9	9
22	KALIMANTAN UTARA	5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
23	SULAWESI UTARA	71	7	7	7	7	7	5	3	2	4	6	8	8
24	GORONTALO	23	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	3
25	SULAWESI TENGAH	61	6	6	6	6	6	4	3	2	4	5	6	7
26	SULAWESI TENGGARA	119	12	12	12	12	11	8	6	4	7	10	13	13
27	SULAWESI SELATAN	606	60	60	62	63	56	40	28	21	36	49	64	67
28	SULAWESI BARAT	38	4	4	4	4	4	2	2	1	2	3	4	4
29	NUSA TENGGARA BARAT	258	25	26	26	27	24	17	12	9	15	21	27	28
30	NUSA TENGGARA TIMUR	76	7,5	7,6	7,8	7,8	7,0	5,0	3,5	2,6	4,5	6,1	8,0	8,3
31	MALUKU	8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,7	0,5	0,4	0,3	0,4	0,6	0,8	0,8
32	PAPUA	41	4	4	4	4	4	3	2	1	2	3	4	5
33	MALUKU UTARA	3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3
34	PAPUA BARAT	6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,4	0,3	0,2	0,4	0,5	0,6	0,7
JUMLAH PROPINSI		12.888	1.274	1.284	1.318	1.330	1.193	848	599	449	765	1.041	1.368	1.419

Lampiran 3.12. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014
Tanggal : 27 Nopember 2014

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

Sub Sektor : Perikanan Budidaya

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	639	63	64	65	66	59	42	30	22	38	52	68	70
2	SUMATERA UTARA	1.461	144	146	149	151	135	96	68	51	87	118	155	161
3	SUMATERA BARAT	775	77	77	79	80	72	51	36	27	46	63	82	85
4	J A M B I	572	57	57	58	59	53	38	27	20	34	46	61	63
5	R I A U	426	42	42	44	44	39	28	20	15	25	34	45	47
6	BENGKULU	243	24	24	25	25	23	16	11	8	14	20	26	27
7	SUMATERA SELATAN	1.216	120	121	124	126	113	80	57	42	72	98	129	134
8	BANGKA BELITUNG	122	12	12	12	13	11	8	6	4	7	10	13	13
9	LAMPUNG	1.399	138	139	143	144	129	92	65	49	83	113	148	154
10	KEP. RIAU	2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
11	DKI. JAKARTA	3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3
12	BANTEN	669	66	67	68	69	62	44	31	23	40	54	71	74
13	JAWA BARAT	4.562	451	454	466	471	422	300	212	159	271	368	484	502
14	D.I. YOGYAKARTA	132	13	13	14	14	12	9	6	5	8	11	14	15
15	JAWA TENGAH	4.987	493	497	510	515	462	328	232	174	296	403	529	549
16	JAWA TIMUR	4.957	490	494	507	512	459	326	230	173	294	400	526	546
17	B A L I	76	8	8	8	8	7	5	4	3	5	6	8	8
18	KALIMANTAN BARAT	426	42	42	44	44	39	28	20	15	25	34	45	47
19	KALIMANTAN TENGAH	152	15	15	16	16	14	10	7	5	9	12	16	17
20	KALIMANTAN SELATAN	228	23	23	23	24	21	15	11	8	14	18	24	25
21	KALIMANTAN TIMUR	167	17	17	17	17	15	11	8	6	10	14	18	18
22	KALIMANTAN UTARA	10	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
23	SULAWESI UTARA	143	14	14	15	15	13	9	7	5	8	12	15	16
24	GORONTALO	46	5	5	5	5	4	3	2	2	3	4	5	5
25	SULAWESI TENGAH	122	12	12	12	13	11	8	6	4	7	10	13	13
26	SULAWESI TENGGARA	238	24	24	24	25	22	16	11	8	14	19	25	26
27	SULAWESI SELATAN	1.216	120	121	124	126	113	80	57	42	72	98	129	134
28	SULAWESI BARAT	76	8	8	8	8	7	5	4	3	5	6	8	8
29	NUSA TENGGARA BARAT	517	51	51	53	53	48	34	24	18	31	42	55	57
30	NUSA TENGGARA TIMUR	152	15	15	16	16	14	10	7	5	9	12	16	17
31	MALUKU	15	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2
32	PAPUA	82	8	8	8	8	8	5	4	3	5	7	9	9
33	MALUKU UTARA	6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,4	0,3	0,2	0,4	0,5	0,6	0,7
34	PAPUA BARAT	12	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
JUMLAH PROPINSI		25.849	2.556	2.574	2.643	2.667	2.392	1.701	1.202	900	1.534	2.088	2.743	2.847

Lampiran 3.13. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014
Tanggal : 27 Nopember 2014

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	11.000	1.110	1.119	1.068	1.011	986	901	731	534	721	975	1.145	698
2	SUMATERA UTARA	52.000	5.248	5.290	5.048	4.778	4.659	4.261	3.457	2.526	3.408	4.608	5.415	3.302
3	SUMATERA BARAT	21.000	2.119	2.137	2.039	1.930	1.881	1.721	1.396	1.020	1.376	1.861	2.187	1.333
4	J A M B I	8.100	817	824	786	744	726	664	539	393	531	718	843	514
5	R I A U	12.000	1.211	1.221	1.165	1.103	1.075	983	798	583	786	1.063	1.250	762
6	BENGKULU	6.100	616	621	592	560	547	500	406	296	400	541	635	387
7	SUMATERA SELATAN	9.000	908	916	874	827	806	738	598	437	590	797	937	571
8	BANGKA BELITUNG	2.500	252	254	243	230	224	205	166	121	164	222	260	159
9	LAMPUNG	21.100	2.129	2.147	2.048	1.939	1.890	1.729	1.403	1.025	1.383	1.870	2.197	1.340
10	KEP. RIAU	50	5	5	5	5	4	4	3	2	3	4	5	3
11	DKI. JAKARTA	40	4	4	4	4	4	3	3	2	3	4	4	3
12	BANTEN	2.100	212	214	204	193	188	172	140	102	138	186	219	133
13	JAWA BARAT	71.000	7.165	7.223	6.893	6.524	6.361	5.819	4.721	3.449	4.653	6.291	7.393	4.508
14	D.I. YOGYAKARTA	9.320	941	948	905	856	835	764	620	453	611	826	970	592
15	JAWA TENGAH	232.300	23.444	23.634	22.552	21.344	20.812	19.037	15.445	11.285	15.225	20.584	24.188	14.750
16	JAWA TIMUR	471.200	47.553	47.939	45.745	43.295	42.216	38.615	31.329	22.891	30.882	41.752	49.064	29.919
17	B A L I	8.500	858	865	825	781	762	697	565	413	557	753	885	540
18	KALIMANTAN BARAT	5.500	555	560	534	505	493	451	366	267	360	487	573	349
19	KALIMANTAN TENGAH	2.200	222	224	214	202	197	180	146	107	144	195	229	140
20	KALIMANTAN SELATAN	2.500	252	254	243	230	224	205	166	121	164	222	260	159
21	KALIMANTAN TIMUR	3.500	353	356	340	322	314	287	233	170	229	310	364	222
22	KALIMANTAN UTARA	390	39	40	38	36	35	32	26	19	26	35	41	25
23	SULAWESI UTARA	600	61	61	58	55	54	49	40	29	39	53	62	38
24	GORONTALO	900	91	92	87	83	81	74	60	44	59	80	94	57
25	SULAWESI TENGAH	11.000	1.110	1.119	1.068	1.011	986	901	731	534	721	975	1.145	698
26	SULAWESI TENGGARA	4.700	474	478	456	432	421	385	312	228	308	416	489	298
27	SULAWESI SELATAN	52.400	5.288	5.331	5.087	4.815	4.695	4.294	3.484	2.546	3.434	4.643	5.456	3.327
28	SULAWESI BARAT	7.100	717	722	689	652	636	582	472	345	465	629	739	451
29	NUSA TENGGARA BARAT	17.000	1.716	1.730	1.650	1.562	1.523	1.393	1.130	826	1.114	1.506	1.770	1.079
30	NUSA TENGGARA TIMUR	2.960	299	301	287	272	265	243	197	144	194	262	308	188
31	MALUKU	480	48	49	47	44	43	39	32	23	31	43	50	30
32	PAPUA	700	71	71	68	64	63	57	47	34	46	62	73	44
33	MALUKU UTARA	500	50	51	49	46	45	41	33	24	33	44	52	32
34	PAPUA BARAT	260	26	26	25	24	23	21	17	13	17	23	27	17
JUMLAH PROPINSI		1.050.000	105.965	106.826	101.936	96.477	94.071	86.049	69.812	51.009	68.815	93.038	109.332	66.670

Lampiran 3.14. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014
Tanggal : 27 Nopember 2014

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

Sub Sektor : Tanaman Pangan

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	7.471	754	760	725	686	669	612	497	363	490	662	778	474
2	SUMATERA UTARA	35.315	3.564	3.593	3.428	3.245	3.164	2.894	2.348	1.716	2.314	3.129	3.677	2.242
3	SUMATERA BARAT	14.262	1.439	1.451	1.385	1.310	1.278	1.169	948	693	935	1.264	1.485	906
4	J A M B I	5.501	555	560	534	505	493	451	366	267	361	487	573	349
5	R I A U	8.150	822	829	791	749	730	668	542	396	534	722	849	517
6	BENGKULU	4.143	418	421	402	381	371	340	275	201	272	367	431	263
7	SUMATERA SELATAN	6.112	617	622	593	562	548	501	406	297	401	542	636	388
8	BANGKA BELITUNG	1.698	171	173	165	156	152	139	113	82	111	150	177	108
9	LAMPUNG	14.330	1.446	1.458	1.391	1.317	1.284	1.174	953	696	939	1.270	1.492	910
10	KEP. RIAU	34	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	4	2
11	DKI. JAKARTA	27	3	3	3	2	2	2	2	1	2	2	3	2
12	BANTEN	1.426	144	145	138	131	128	117	95	69	93	126	149	91
13	JAWA BARAT	48.219	4.866	4.906	4.681	4.431	4.320	3.952	3.206	2.342	3.160	4.273	5.021	3.062
14	D.I. YOGYAKARTA	6.330	639	644	614	582	567	519	421	307	415	561	659	402
15	JAWA TENGAH	157.764	15.921	16.051	15.316	14.496	14.134	12.929	10.489	7.664	10.340	13.979	16.427	10.017
16	JAWA TIMUR	320.011	32.295	32.558	31.067	29.404	28.670	26.225	21.277	15.546	20.973	28.355	33.321	20.319
17	B A L I	5.773	583	587	560	530	517	473	384	280	378	512	601	367
18	KALIMANTAN BARAT	3.735	377	380	363	343	335	306	248	181	245	331	389	237
19	KALIMANTAN TENGAH	1.494	151	152	145	137	134	122	99	73	98	132	156	95
20	KALIMANTAN SELATAN	1.698	171	173	165	156	152	139	113	82	111	150	177	108
21	KALIMANTAN TIMUR	2.377	240	242	231	218	213	195	158	115	156	211	248	151
22	KALIMANTAN UTARA	265	27	27	26	24	24	22	18	13	17	23	28	17
23	SULAWESI UTARA	407	41	41	40	37	37	33	27	20	27	36	42	26
24	GORONTALO	611	62	62	59	56	55	50	41	30	40	54	64	39
25	SULAWESI TENGAH	7.471	754	760	725	686	669	612	497	363	490	662	778	474
26	SULAWESI TENGGARA	3.192	322	325	310	293	286	262	212	155	209	283	332	203
27	SULAWESI SELATAN	35.587	3.591	3.621	3.455	3.270	3.188	2.916	2.366	1.729	2.332	3.153	3.706	2.260
28	SULAWESI BARAT	4.822	487	491	468	443	432	395	321	234	316	427	502	306
29	NUSA TENGGARA BARAT	11.545	1.165	1.175	1.121	1.061	1.034	946	768	561	757	1.023	1.202	733
30	NUSA TENGGARA TIMUR	2.010	203	205	195	185	180	165	134	98	132	178	209	128
31	MALUKU	326	33	33	32	30	29	27	22	16	21	29	34	21
32	PAPUA	475	48	48	46	44	43	39	32	23	31	42	50	30
33	MALUKU UTARA	340	34	35	33	31	30	28	23	16	22	30	35	22
34	PAPUA BARAT	177	18	18	17	16	16	14	12	9	12	16	18	11
	JUMLAH PROPINSI	713.097	71.965	72.550	69.229	65.521	63.887	58.439	47.412	34.642	46.735	63.186	74.252	45.278